

KETERLIBATAN TOKOH MELAYU DALAM PILKADA DI KOTA PALEMBANG SUMATRA SELATAN

Darmawan Z

Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang

email: darmawanzainal2@gmail.com

Abstract

This article discusses the involvement of Malay leaders in 2018 regional head elections in Palembang City. The character will play a very important role in winning the battle between political parties in the city of Palembang, traditional factors and local leaders play a role. While traditional leaders and religious leaders, have their own influence for society. Malay community leaders are people who have influence and are respected by the community because of the wealth of their knowledge. The role of the involvement of Malay cultural figures on the electability of candidates for the Regional Head in Palembang City, it is known that many ulama and community leaders were made as success teams as well as the main supporters of each candidate pair of mayors / deputy mayors of Palembang. Local politics is increasingly developing as a snowball-like force that is increasingly growing as a force that can influence the political system in Palembang City

Abstrak

Artikel ini membahas tentang keterlibatan tokoh Melayu dalam pemilihan kepala daerah 2018 di Kota Palembang. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan di antara partai politik di Kota Palembang, faktor adat dan tokoh lokal cukup berperan. Sementara tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Tokoh masyarakat Melayu merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat, karena kekayaan pengetahuannya. Peran keterlibatan tokoh budaya Melayu terhadap elektabilitas calon Kepala Daerah di Kota Palembang, diketahui banyak para tokoh ulama maupun tokoh masyarakat yang dijadikan tim sukses maupun pendukung utama dari tiap-tiap pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Palembang. Politik lokal kian berkembang sebagai kekuatan bak bola salju yang kian lama kian berkembang sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi sistem perpolitikan di Kota Palembang.

Kata Kunci: *Tokoh Melayu, Pilkada, Kota Palembang*

PENDAHULUAN

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem elit *vote* ke popular *vote*. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan

permasalahan di sana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan.

Kedudukan kepala daerah sebelumnya, yakni pada masa rezim orla dan orba ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, namun kini masyarakat Indonesia dapat secara langsung memilih pemimpin daerahnya.¹

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam penyelenggaraan PILKADA. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format

demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik.²

Sementara menurut Bambang Purwoko menjelaskan bahwa: “Dalam Pilkada Langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan”.³

Dengan demikian adanya Pilkada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat di daerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya pilkada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, di mana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Otonomi Daerah memberikan konsekuensi yang logis kepada masyarakat untuk aktif dalam proses politik. Jika dahulu, pemimpin daerah akan dipilih oleh DPR maka sekarang rakyat langsung yang memilih kepala daerah mereka untuk lima tahun ke depan. Kesalahan dalam memilih akan berdampak kepada kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi politik menjadi hal yang penting. Rakyat

¹ Amrianto, “Peranan Elit Tradisional dalam Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014” <https://media.neliti.com/media/publications/1145-ID-peranan-elit-tradisional-dalam-dinamika-politik-lokal-pada-pemilihan-kepala-daer.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017

²Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan diIndonesia*, (Yogyakarta: PustakaPelajar: LP3M, 2005), h. 2

³ Purwoko, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, (terj.), (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 81

diharapkan aktif dalam mencari informasi tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Seperti yang dikatakan oleh Agustino bahwa keberhasilan sistem demokrasi di suatu negara sangat ditentukan oleh partisipasi dari masyarakatnya, dan tatanan negara yang baik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat lokal.⁴

Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak pada proses politik itu sendiri karena masyarakat akan menjadi lebih 'melek politik' dan tidak mudah termakan bujuk rayu calon pemimpin mereka. Praktik pemilihan Kepala Daerah secara langsung memiliki artikulasi lokal di berbagai daerah, sebagaimana terjadi di Kota Palembang Sumatera Selatan.⁵

Islam kemudian tidak hanya dipandang hanya sebagai agama saja, tetapi seolah menjadi basis politik yang kemudian disematkan pada etnis Melayu Palembang, yang *notabene*nya adalah muslim. Etnis Melayu, kemudian menjadi penting dalam perpolitikan di Palembang sehingga keterlibatan tokoh Melayu Palembang memiliki andil yang cukup besar bagi kemenangan calon pemimpin Palembang di masa depan. Ini dikarenakan tokoh Melayu dianggap sebagai seseorang yang mendapat apresiasi dari masyarakat karena ilmunya, kedudukannya, kedermawanannya, aktivitas dan pengabdianannya yang diabdikan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.⁶

Agama, budaya, serta politik senyatanya adalah entitas yang harus berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, seperti kasus di Kota Palembang, agama dan budaya dicampuradukkan dengan

urusan politik. Padahal agama mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhannya, budaya mengurus nilai dan norma dalam masyarakat, dan politik berurusan dengan masalah kekuasaan. Ketika agama dan etnis sudah bercampur dengan urusan politik maka politik itu akan menghancurkan nilai-nilai kebudayaan dalam suatu masyarakat untuk mendukung penguasa-penguasa terpilih.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruang yang luas atau di tengah-tengah masyarakat. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya tentang keterlibatan tokoh Melayu Islam dalam politik pemilihan Kepala Daerah di Kota Palembang, dan melakukan analisis secara mendalam terhadap persoalan terkait sehingga ditemukan data dan gagasan yang menarik untuk dibahas dalam kajian ini.

Data dari kajian ini diambil dari berbagai macam informan dan dokumen, adapun yang menjadi sumber data pada kajian ini adalah tokoh-tokoh Melayu dan juga beberapa tokoh lainnya dapat ditelusuri melalui tulisan berupa dokumen. Selanjutnya penulis akan menindaklanjuti informasi dari sumber data tersebut dengan mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang berkenaan dengan topik yang penulis susun.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan ketiganya. Penelitian ini menggunakan ketiga teknik tersebut, akan tetapi yang lebih utama adalah teknik wawancara mendalam karena teknik ini dapat

⁴*Ibid*

⁵<http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaan-geografis&bhsnyo=id>

⁶<http://mujahidinmudaa.blogspot.com/2014/04/sistem-politik-ekonomi-dan-sistem.html>

mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik suatu fenomena yang nampak. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi digunakan untuk membantu, memperkaya, dan melengkapi data penelitian.

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data. Penelitian kualitatif dilakukan:

1. Analisis selama pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahap model air yaitu produksi data dan selanjutnya membuat kode serta mengembangkan proposisi sehingga memperoleh kesimpulan.
2. Analisis dalam situs artinya peneliti membuat bagan-bagan dalam matriks daftar masalah yang tertata berdasarkan waktu, keadaan, yang pada akhirnya melakukan verifikasi jaringan kasual untuk menguji predeksi.

Analisis lintas situs artinya mengurutkan substansi masalah dalam tabel ringkasan yang selanjutnya menyajikan bagan pencari lintas situs waktu dan setiap peristiwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Tokoh Melayu dalam Pilkada

Masalah Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem *elite vote* ke *popular vote*. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan di sana sini, namun permasalahan yang paling mencolok adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak hanya merupakan format baru dalam kancah politik nasional, melainkan

merupakan arus politik demokrasi pada arus lokal.

Kedudukan kepala daerah sebelumnya yakni pada masa rezim orde lama dan orde baru ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.⁷ Pada masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di daerahnya.

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan di tingkat Kota Palembang dewasa ini menurut pengamatan penulis di lapangan yaitu cenderung menciptakan kembali ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan. Namun, pilkada Kota Palembang dapat juga memberi ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan ataupun kepentingan politik untuk kebaikan masyarakatnya.

Karena tokoh masyarakat mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu menyambut kebijakan desentralisasi

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2001), h. 99.

tersebut. Keberadaan tokoh masyarakat seperti yang ada di Kecamatan Kertapati Kota Palembang, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. Pilkada Walikota dan Wakil Walikota yang berlangsung di Kota Palembang, ini menarik untuk dicermati karena eksistensi tokoh masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga merupakan bagian dari partisipasi politik, ternyata dapat memberikan kembali ruang-ruang etnisitas untuk tumbuh subur di masyarakat.⁸

Bercermin pada ajang pilkada yang telah bergulir di daerah lain khususnya tetangga Kota Palembang, tampaknya bahwa mesin politik partai politik bukanlah satu-satunya penyokong kemenangan. Popularitas tokoh masyarakat sering kali justru menentukan kemana pilihan dijatuhkan. Dalam hal ini, kualitas dan rekam jejak selama ini menjadi acuan popularitas tokoh-tokoh yang bersaing dalam kontestasi politik lokal. Disisi lain, bagi tokoh budaya di Palembang, selain kualitas serta rekam jejak pemimpin selama ini, ikatan etnisitas dan kekerabatan masih sangat kental.

Menurut Tokoh budaya dan ulama yang sekaligus sebagai ketua MUI Kota Palembang Ustadz Saim Marhadan⁹ bahwa faktor-faktor politik semacam ini secara langsung memberi celah bagi peranan patron sebagai pengarah opini publik yang potensial di ranah politik. Melihat lebih seksama kontestasi politik lokal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang sedang berlangsung di Kota Palembang, tokoh masyarakat masih lebih

cenderung dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialnya.

“Perubahan yang berlangsung, sejalan dengan diturunkannya Soeharto dari panggung politik, telah mendorong suatu perubahan signifikan dalam konfigurasi politik. Karena itu perubahan yang terjadi saat ini dipandang sebagai suatu langkah baru menuju terciptanya Indonesia baru di masa depan dengan dasar-dasar efisiensi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tuntutan reformasi itu sendiri datangnya dari dua arah, yaitu secara internal dan secara eksternal sebagai bagian dari masyarakat global”¹⁰.

“Menurut Ketua Panwaslu Kota Palembang M. Taufik, bahwa secara intern tuntutan reformasi muncul akibat terjadinya peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang mudah diperoleh. Kondisi ini telah menyebabkan masyarakat makin kritis. Dalam mencermati pengelolaan kekuasaan negara yang telah dianggap telah menyimpang dari komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat mulai berani menyatakan sikap dan mengungkapkan berbagai penyelewengan yang ada”.¹¹

Semua ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat. Pilihan demokrasi menjadi pilihan wajib kegiatan berdasarkan pertimbangan bahwa hanya pemerintahan yang demokratislah yang dapat menempatkan manusia pada jati dirinya. Proses demokratisasi itu sendiri sedang berlangsung di Indonesia. Di mana

⁸<http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaan-geografis&bhsnyo=id>

⁹ Hasil wawancara dengan Ustadz Saim Marhadan sebagai seorang tokoh agama dan sekaligus ketua MUI Kota Palembang, di Palembang pada Maret 2018

¹⁰<https://www.neliti.com/publications/1015/evaluasi-peran-tokoh-masyarakat-terhadap-partisipasi-politik-pada-pemilihan-bupa>

¹¹ Pernyataan Ketua Panwaslu Kota Palembang M. Taufik, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018

saluran-saluran yang dulunya dianggap menghambat demokratisasi telah dibuka secara lebar.

Menurut penulis ada beberapa aspek substansial yang telah mengalami perubahan antara lain adalah pergeseran sistem kepartaian. Pada masa orde baru kita menganut sistem multi partai yang oleh beberapa kalangan dianggap merupakan sistem kepartaian yang semu, karena dalam kenyataannya hanya satu partai saja yang selalu mendominasi perolehan suara dalam setiap pemilu. Pada masa reformasi ini menerapkan sistem multi partai yang murni.

Demikian halnya dengan sistem pemilu yang telah mengalami penyempurnaan, di mana saat ini telah menggunakan sistem proporsional daftar terbuka di mana sistem ini lebih memberikan kebebasan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan pemilik pemerintah itu sendiri. Selain itu pula sekarang ini telah dilaksanakan pemilihan umum secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan pada pemerintahan menggunakan sistem demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950. Pada waktu itu puluhan partai dan perorangan turut sebagai kontestan pemilu, dan akhirnya memang tidak ada kontestan yang memperoleh suara mayoritas. Dan disinilah kelemahan sistem demokrasi liberal, pemerintah akan mudah jatuh kalau tidak di dukung oleh partai dengan suara mayoritas. Terlepas dari hasil pemilu 1955 yang tidak mampu menghadirkan sebuah partai dengan suara mayoritas dan kemudian konstituante yang baru menggantikan UUDS 1950, pemilu 1955 adalah contoh pelaksanaan pemilu yang sangat fair. Pemilu 1955 telah menjadi bagian

dari sejarah Indonesia, kegagalan maupun keberhasilannya.

Proses transformasi politik yang diawali dengan runtuhnya rezim otoritarian menuju tatanan politik yang demokratis merupakan suatu perubahan yang sangat mendasar. Demokrasi dimaksudkan sebagai upaya membangun struktur dan sistem serta pengelolaan kekuasaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini diawali dengan pemilu 1999. Namun penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999 tidak segera dapat menyelesaikan persoalan bangsa. Hal ini disebabkan oleh karena kehidupan politik selama kurang lebih empat belas tahun terakhir ini, perilaku elit politik sangat berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok.

Sempitnya, peran mereka jauh dari empati terhadap penderitaan dan kepentingan masyarakat. Wilayah politik yang seharusnya menjadi tempat di mana para elit bertanding merebut dukungan rakyat dengan menawarkan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada kepentingan umum, hanya menjadi ajang perburuan kekuasaan yang didominasi oleh intrik dan akrobat politik yang mengabaikan norma dan etik serta komitmen kepada kepentingan rakyat.

Proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2014 yang berlangsung di Kota Palembang, membawa peran serta tokoh masyarakat lokal dalam pergulatan politik yang sedang menuju babak baru yakni politik identitas. Merespon kebijakan desentralisasi yang dewasa ini telah banyak diselenggarakan diberbagai daerah di Indonesia. Peran tokoh masyarakat tersebut kemudian mendapat perhatian berbagai kalangan politik dan masyarakat besar yang ada di Indonesia guna sebagai mesin pendongkrak suara pada setiap

pemilihan umum yang digelar disetiap daerah.¹²

Pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2014 lalu di Kota Palembang dilangsungkan bahwa pada pemilihan kepala daerah di Kota Palembang masih kuatnya hubungan ikatan primordialisme yang sangat kental dalam melakukan suatu *resume* politik. Seorang tokoh masyarakat dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat. Ketokohan seseorang dalam masyarakat merupakan representasi atau perwakilan kepentingan masyarakat itu sendiri, maka dari itu sesuai yang dikemukakan bahwa tokoh masyarakat ialah orang yang dianggap sebagai perwujudan dari masyarakat itu sendiri.

Fakta objektif tersebut, beranggapan bahwa peranan tokoh masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga mengindikasikan bahwa beberapa tokoh masyarakat, di antaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pilkada yang berlangsung di Kota Palembang. Tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan kepentingan dari semua elemen di dalam masyarakat itu kemudian mewujudkan dalam rangka mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan masyarakat serta senantiasa menjadi yang terdepan dalam proses pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada dalam masyarakatnya.

Legitimasi Tradisi Melayu dalam PolitikPilkada

Masuknya Islam ke wilayah kepulauan Melayu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Melayu yang

kemudian identik dengan Islam. Sebab, Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu telah berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran Nasional. Syed. Muhammad Naquib al-Attas menegaskan:

Together with the historical factor, the religious and language factors began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its national language.... The coming of Islam constituted the inauguration of a new period in the history of the Malay-Indonesian Archipelago”.¹³

Selain itu, Naquib al-Attas menegaskan bahwa Islam telah berjasa kepada Melayu Nusantara karena telah memberi semangat hebat yang menggerakkan proses revolusi hidup berdasarkan pandangan alam seni dan alam falsafah yang berdasarkan akal dan budi.¹⁴

Dalam perkembangannya, Melayu diidentikkan dengan Islam. Bahkan, Islam dan Melayu menjadi dua kata yang sering harus berjalan beriringan; Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu, sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam. Bagi komunitas Melayu, hal ini terefleksikan dalam satu istilah “masuk Melayu”. Istilah ini mempunyai dua arti, yaitu: 1) mengikuti

¹³ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), h. 178.

¹⁴ Ustaz Haji MD. Zain Haji Serudin, *Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1998), h. 224.

¹²<http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaan-geografis&bhsnyo=id>

cara hidup orang-orang Melayu; dan 2) masuk Islam".¹⁵

Istilah ini demikian mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya akan banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu, tidak terkecuali dalam mengekspresikan gagasan-gagasan tentang politik, seperti konsep kekuasaan, penguasa atau raja, hubungan penguasa dengan rakyat, serta hal-hal lain yang berada dalam ranah politik.

Maka, dapat disimpulkan bahwa orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya dengan tiga ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu, dan beragama Islam. Berdasarkan ciri-ciri pokok tersebut, masyarakat Melayu Nusantara dipersatukan oleh adanya kerajaan-kerajaan Melayu pada masa lampau. Kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu telah meninggalkan tradisi-tradisi dan simbol-simbol kebudayaan Melayu yang menyelimuti berbagai suasana kehidupan hampir sebagian besar masyarakat wilayah kepulauan tersebut. Kerajaan-kerajaan besar Melayu bukan saja terpusat di Pulau Sumatera khususnya Palembang, namun penyebarannya mencapai sebagian besar wilayah Nusantara.

Hal ini dapat saja terjadi karena adanya beberapa penguasa beserta pengikutnya dari kerajaan-kerajaan tersebut yang melarikan diri karena berbagai faktor, dan kemudian

mendirikan kerajaan Melayu baru di daerah lain.

Simbol-simbol yang berasal dari kebudayaan Melayu, yang berlaku di tempat-tempat umum serta yang digunakan untuk menjembatani berbagai suku bangsa dan golongan etnis yang berbeda sehingga dapat saling berinteraksi adalah bahasa Melayu dan etika Melayu (antara lain keramahtamahan dan keterbukaan). Dapat dikatakan, kebudayaan Melayu memiliki ciri-ciri utama yang bersifat fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan.

Ciri-ciri seperti yang dimiliki kebudayaan Melayu muncul dari pengalaman sejarah kebudayaan Melayu yang selama berabad-abad telah mengalami kontak dengan berbagai kebudayaan asing, baik yang hanya karena hubungan dagang maupun yang menetap. Karena itu, kebudayaan Melayu juga memiliki kesanggupan yang besar dalam mengambil alih unsur-unsur kebudayaan non-Melayu.

Kebudayaan Melayu yang diterima oleh semua golongan masyarakat tumbuh dari sejarah perkembangan kebudayaan Melayu itu sendiri, yang selalu berkaitan dengan tumbuh, berkembang, dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Melayu, dengan agama Islam, perdagangan internasional, serta penggunaan bahasa Melayu. Oleh karena itu, simbol-simbol kebudayaan Melayu yang sampai sekarang diakui sebagai identitas Melayu adalah bahasa Melayu, agama Islam, serta kepribadian yang terbuka dan ramah.

"Pada dasarnya, agama Islam yang dianut oleh orang Melayu adalah Islam tarekat dan aliran yang membenarkan tetap berlangsungnya tradisi-tradisi setempat yang bernaung di bawah keagungan Islam. Tarekat Naqshabandiyah, misalnya,

¹⁵ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan Bahasa*, (Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989). Dikutip oleh Adian Husaini, "Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu", dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 55.

diperkenalkan di Riau pada abad ke-19 oleh Syekh Ismail yang juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan intelektual di Riau. Di antara tokoh-tokoh penganut tarekat ini adalah Raja Ali YTM Riau ke-8, Raja Haji Abdullah YTM ke-9, dan Raja Ali Haji (RAH)".¹⁶

Selain itu, banyak raja dan pembesar Riau bersatu di bawah sebuah perkumpulan bernama Rusyidah Kelab. Perkumpulan ini telah banyak menghasilkan karya seperti *Risalat al-Fawaid al-Wafiat fi Syarah Ma`ana al-Tahiyat*.¹⁷

Dalam agama Islam yang dianut oleh orang Melayu, terdapat variasi ajaran, yaitu perpaduan antara Islam tradisional dan Islam modern. Variasi ini mengikuti sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu yang tradisi-tradisinya masih tetap berlaku sampai sekarang dalam wilayah-wilayah bekas kekuasaan kerajaan-kerajaan yang bersangkutan. Syed. M. Naquib Al-Attas mengklasifikasikan proses Islamisasi di kepulauan Melayu menjadi tiga fase: *pertama*, proses Islamisasi kepulauan Melayu yang dapat diamati sejak abad ke-13 dan ditandai oleh peranan fikih yang dominan dalam menginterpretasikan syari`at".¹⁸

Dalam fase ini, konsep fundamental mengenai keesaan Tuhan masih kabur dan dipahami secara samar-samar, yang di dalamnya terdapat sebagian konsep pandangan hidup kuno Hindu-Budha yang masih tumpang tindih, dibayang-bayangi atau dibingungkan oleh konsep baru dalam pandangan Islam. Al-Attas

mengistilahkan fase ini sebagai fase sebelum periode Hamzah Fanshuri, tokoh sufi Melayu.

Fase *kedua*, yang diamati dari abad ke-15 hingga akhir abad ke-18, di mana penafsiran hukum-hukum agama secara umum ditandai dengan dominasi tasawuf dan kalam. Pada fase ini, beberapa konsep dasar yang masih dipahami secara kabur itu dijelaskan dan didefinisikan sehingga dapat dipahami secara transparan dan semi transparan. Yang dimaksud Al-Attas dengan transparan dan semi transparan adalah pengertian-pengertian sempurna dan parsial dari makna-makna Islami, sebab selain konsep, kata-kata tidak menjelaskan realitas objektif sesuatu yang digambarkan. Sehingga yang penting adalah memahami pengertian dasar kata-kata itu dan pengertian yang berhubungan dengannya, sebab kata-kata itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki konteks dan bidang semantik tertentu.

Fase *ketiga*, proses Islamisasi sebagai kelanjutan dari fase kedua. Namun, al-Attas mengingatkan bahwa proses-proses ini tidak semestinya dilihat secara terpisah, seperti satu fase berlangsung ketika fase yang lain berhenti.¹⁹ Dengan demikian, proses Islamisasi kepulauan Melayu merupakan sebuah fenomena sejarah yang universal. Maka, untuk memahami Islam di dunia Melayu berarti harus memahami Islam itu sendiri sebagai sebuah agama dan peradaban.²⁰

Bangsa Melayu selanjutnya menjadikan Islam sebagai landasan dasar perumusan etika bagi perilaku politik para penguasa di kerajaan. Gambaran tersebut, misalnya, tampak dalam pembahasan teks-teks Melayu Klasik, seperti Sejarah Melayu dan

¹⁶ Abu Hassan Sham, *Puisi-puisi Raja Ali Habsi*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), h. 64

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 319-320.

¹⁹<http://mujahidinmudaa.blogspot.com/2014/04/sistem-politik-ekonomi-dan-sistem.html>

²⁰ *Ibid.*, h. 323

Hikayat Raja-raja Pasai dua teks yang masing-masing berbicara tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Melaka abad 14 dan 15 di mana perumusan Islam sebagai basis etika politik terlihat dengan jelas pada isu-isu pokok politik yang mengemuka dalam keseluruhan isi pembahasan. Merah Silu, salah seorang Raja Pasai misalnya, digambarkan bahwa sesaat setelah beralih ke agama Islam ia segera memakai gelar Arab yaitu Sultan, dan dalam suatu sidang dengan para pimpinan dan rakyatnya, ia dinyatakan sebagai “Bayang-bayang Tuhan di Bumi” (*Zillullah fil Alam*).²¹

Pentingnya Tradisi Melayu dalam Politik Pilkada

Tradisi politik melayu adalah politik yang beretika, memiliki moral dan tidak menghalalkan berbagai cara dalam mencapai tujuan keinginannya. Dalam sejarah telah membuktikan bahwa kepemimpinan raja atau sultan di masyarakat Melayu pernah mengalami masa keemasannya. Ifat berdagang yang dijalankan oleh orang-orang Melayu mampu merambah berbagai belahan bumi pada zamannya. Bahkan pada era Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, kerajaan Aceh masuk dalam lima kerajaan terbesar di dunia.

Dahulu pada kerajaan Sriwijaya, dengan rajanya Dharmasraya, yang menaungi wilayah Malayu-Jambi, Aceh dan Malaka diakui oleh dunia pada masanya dengan kebesaran budaya dan peradabannya serta kekuasaan wilayah yang dimiliki. Semua itu tidak bisa terjadi kecuali kepemimpinan dalam tradisi Melayu saat itu sudah memiliki jati diri yang kuat, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, berdaya tahan tinggi dan berperan aktif

dalam kesinambungan kehidupan bangsa.

Menurut Bursya Syarnubi bahwa sejarah negeri Melayu banyak mencatatkan kearifan bidang kepemimpinan dalam perspektif budaya Melayu. Sehingga ditengah krisis kepemimpinan yang melanda negeri ini, sebenarnya tradisi budaya Melayu sejak dahulu telah menawarkan model kepemimpinan yang sesuai di Indonesia khususnya dalam persoalan-persoalan politik yang sering dihadapi saat ini. Juga jika melihat kareakter pemimpin ideal yang ada dalam tradisi budaya Melayu, maka akan sangat sesuai dengan model kepemimpinan transformasional pada zaman sekarang. Kepemimpinan transformasional berkaitan dengan nilai-nilai yang sesuai bagi proses perubahan, seperti sifat jujur, keadilan dan tanggung jawab.²²

Model kepemimpinan dalam tradisi Melayu, saat ini sering sederhanakan dengan istilah model kepemimpinan transformasional di era kontemporer. Pemimpin yang transformatif lebih memposisikan diri mereka sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Dalam pendapat lain, kepemimpinan transformatif didefinisikan sebagai kepemimpinan dimana para pemimpin menggunakan kharisma mereka untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi organisasinya. Para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para pengikutnya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-intruksi yang bersifat *top-down*.

²¹ Oman Fathurrahman, “Demokrasi” dalam *Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap*, www.islamlib.com.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Bursya Syarnubi, seorang tokoh budaya di kota Palembang dan merupakan Politisi di Sumatera Selatan, di Palembang pada tanggal 18 Maret 2018

Jadi model kepemimpinan tradisi Melayu masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, karena model kepemimpinan tradisinya adalah transformasional, yang diharapkan bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik.

Pada khazanah politik Melayu, pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Arti raja atau penguasa bagi orang Melayu dimaknai lewat pepatah lama berikut ini:

*Yang didahulukan selangkah
Yang ditinggikan seranting
Yang dilebihkan serambut
Yang dimuliakan sekuku²³*

Pepatah tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang raja haruslah sosok manusia yang dapat dijangkau oleh rakyat biasa. Penguasa harus berada di tengah-tengah rakyatnya, mengerti kondisi warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Raja bukanlah dewa yang tak tersentuh oleh manusia, melainkan sosok yang hanya diberi beberapa kelebihan seperti di atas.

Pengaruh Keterlibatan Tokoh Melayu dalam Pelaksanaan Pilkada

Latar Belakang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung lantaran diperintahkan oleh undang-undang yang merupakan salah satu bentuk sistem negara demokrasi yang dianut Indonesia, pemilu langsung ini yang tampil dihadapan sejak masa 2005 lalu. Pemilukada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari Walikota, Bupati hingga Gubernur.

Berbeda dengan pilkada langsung tidak serentak yang diselenggarakan pada perodesasi sebelumnya, maka pilkada langsung secara serentak mempunyai ciri-ciri khas tersendiri diantaranya, untuk kali pertama diselenggarakannya pemilihan dengan Pasangan Calon (Paslon) tunggal, dibebankannya pembiayaan Kampanye Paslon Kepada Negara (KPUD) serta pemilihannya bersifat serentak dalam arti waktu penyelenggaraan Pilkada di satu daerah sama dengan di daerah lain. Pilkada serentak ini direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Pilkada serentak ini diharapkan menjadi *exercise* dan percontohan bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya. Karena itu, pengalaman pertama menyelenggarakan pilkada secara serentak diharapkan dapat menjadi *blue print* bagi bangsa ini untuk memperoleh sesuatu yang ideal. Maka tidak mungkin agar tercipta penyelenggaraan yang ideal yang kemudian akan menjadi *pattern* di masa mendatang, beban untuk menyukseskannya hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu.

Kesuksesan pilkada serentak tidak bisa ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi oleh *stakeholders* yang terkait seperti, pemerintah, aparat hukum/keamanan maupun partai politik. Pemerintah menjadi penting bagi terselenggaranya pilkada yang sesuai dengan harapan. Pemerintah menjadi faktor determinan, karena pada kenyataannya, merekalah yang mempunyai kewenangan untuk mengoptimalkan pendanaan yang dibutuhkan bagi kesuksesan pilkada. Tanpa adanya kualitas pendanaan yang optimal, maka kualitas penyelenggaraan pilkada akan jauh dari memuaskan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan aparat hukum/keamanan untuk mengawal

²³<http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaan-geografis&bhsnyo=id>

pikada dengan terselenggara secara kondusif dan tidak berimpikasi terjadi konflik di masyarakat. Kesiapan aparat hukum/keamanan untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang di luar dugaan. Netralitas aparat hukum/keamanan menjadi sesuatu yang penting dalam upaya menciptakan pilkada yang berkualitas.

Yang juga tidak boleh dilupakan adalah peran parpol untuk menjadikan pilkada serentak ini berkualitas dan penuh integritas. Parpol menjadi instrumen penting bagi pendewasaan politik pemilih. Dalam tradisi *patronclient* yang masih berkembang di Indonesia ini, parpol dapat memfungsikan dirinya untuk selalu aktif mengawal agar pilkada berlangsung secara harmoni, tanpa caci maki dan selalu berjalan dalam praktek-praktek kesantunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Surya Paloh, bahwa tugas parpol adalah menciptakan iklim yang kondusif, situasi sejuk dan pikiran yang jernih dalam penyelenggaraan pilkada ini.

Bagi partai politik peserta pemilu dan mempunyai kursinya di DPRD, telah terjadi pergeseran mekanisme dari sistem perwakilan di mana pada waktu itu anggota DPRD memilih kepala daerah menjadi ke sistem pemilihan langsung, masyarakat memilih kepala daerahnya, telah mengharuskan institusi partai politik melakukan pembenahan dalam strategi pendekatannya untuk menggapai ke kursi kekuasaan (eksekutif). Hal ini dikarenakan pemilih bukan lagi diranah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan masyarakat langsung yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Selatan yang ikut melaksanakan Pemilu. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan di antara partai politik di Kota Palembang, faktor adat dan tokoh

lokal cukup berperan. Semakin jauh dari pusat, maka partai yang tidak memiliki tokoh populer peluangnya dalam Pemilu semakin berat. Sementara tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Di era otonomi sekarang, tokoh lokal cukup berpengaruh kepada para pemilih.

Tokoh masyarakat merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang.²⁴

Dari pengamatan penulis dilapangan, diketahui banyak para tokoh ulama maupun tokoh masyarakat yang dijadikan tim sukses maupun pendukung utama dari tiap-tiap pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Palembang. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Edwar Zombi, H. Marzuki (Wak Gajah), H. Syamsuri (H. Syam). Dari tokoh yang terlibat diketahui bukan hanya sekedar menjadi tokoh panutan masyarakat, namun juga memiliki basis masa yang besar seperti Edwar Zombi yang pada awalnya mendukung pasangan Sarimuda, beralih mendukung pasangan yang lama yaitu Harnojoyo. Dengan memiliki kekayaan intelektual dan keberhasilan yang dimiliki seorang tokoh masyarakat, mereka dianggap memiliki peran yang penting dalam menunjang pendulangan suara pasangan calon.

Ada beberapa fenomena politik di Kota Palembang yang dilakukan oleh tokoh Budaya Palembang. Geopolitik Palembang tentu tidak bisa dipisahkan dari peran orang-orang sekitar. Bahwa Palembang adalah negeri ulama dan agamis, untuk itu sebabnya tokoh Nahdatul Ulama seperti KH. Muddaris,

²⁴ Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim, 2017, *Sejarah Tokoh Budaya dan Tokoh Agama Sumatera Selatan*. (Serunting Press, Palembang), h. 26

Dr. H. Ali Masykur Musa dan Ketua PC NU Kota Palembang KH. Rosidin Hasan yang disebut-sebut masyarakat Palembang sebagai tokoh sentral dalam memperjuangkan terbentuknya pemimpin muslim yang peduli dengan Islam.

Tokoh sentral yang dimaksud adalah suatu ketokohan yang berperan sangat penting dalam kepemimpinan umat dan pembangunan Kota Palembang dan pernah memegang jabatan yang strategis. Pemilukada Kota Palembang 2018-2023 dipengaruhi berbagai Dinamika Peristiwa politik dalam Pemilukada Kota Palembang .

KESIMPULAN

Keterlibatan tokoh Melayu dalam pemilihan kepala daerah 2018 di Kota Palembang merupakan tokoh melayu yang ada di Sumatera Selatan yang ikut melaksanakan Pemilukada. Ketokohan akan sangat berperan penting dalam memenangkan pertarungan di antara partai politik di Kota Palembang, faktor adat dan tokoh lokal cukup berperan. Semakin jauh dari pusat, maka partai yang tidak memiliki tokoh populer peluangnya dalam Pemilu semakin berat. Sementara tokoh adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh tersendiri untuk masyarakat. Di era otonomi sekarang, tokoh lokal cukup berpengaruh kepada para pemilih. Tokoh masyarakat melayu merupakan orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan pengetahuannya. Mereka menjadi contoh dan teladan bagi orang lain karena pola pikir yang dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi panutan bagi banyak orang.

Peran keterlibatan tokoh budaya Melayu terhadap elektabilitas calon Kepala Daerah di Kota Palembang, diketahui banyak para tokoh ulama maupun tokoh masyarakat yang dijadikan tim sukses maupun pendukung utama dari tiap-tiap

pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Palembang. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Edwar Zombi, H. Marzuki (Wak Gajah), H. Syamsuri (H. Syam). Dari tokoh yang terlibat diketahui bukan hanya sekedar menjadi tokoh panutan masyarakat, namun juga memiliki basis masa yang besar seperti Edwar Zombi yang pada awalnya mendukung pasangan Sarimuda, beralih mendukung pasangan yang lama yaitu Harnojoyo. Politik lokal kian berkembang sebagai kekuatan bak bola salju yang kian lama kian berkembang sebagai kekuatan yang bisa mempengaruhi sistem perpolitikan baik di level daerah maupun di level yang lebih besar yaitu nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Amrianto. "Peranan Elit Tradisional dalam Dinamika Politik Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014"

- <https://media.neliti.com/media/publications/1145-ID-peranan-elit-tradisional-dalam-dinamika-politik-lokal-pada-pemilihan-kepala-daer.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan Bahasa*, Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989.
- Fathurrahman, Oman, "Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap", www.islamlib.com.
- <http://mujahidinmudaa.blogspot.com/2014/04/sistem-politik-ekonomi-dan-sistem.html>
- <http://mujahidinmudaa.blogspot.com/2014/04/sistem-politik-ekonomi-dan-sistem.html>
- <http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id>
- <http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id>
- <http://palembang.go.id/?nmodul=halaman&judul=keadaaan-geografis&bhsnyo=id>
- <http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-sriwijaya.html>
- <https://www.neliti.com/publications/1015/evaluasi-peran-tokoh-masyarakat-terhadap-partisipasi-politik-pada-pemilihan-bupa>
- Husaini, Adian, *Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu, dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: PustakaPelajar: LP3M, 2005.
- Purwoko, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. (terj.), Jakarta: LP3ES, 2003.
- S Lev, Daniel, *Islamic courts in Indonesia A Study in the Political Bases of Legal Institutions*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972.
- Serudin, Zain Haji, *Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan*, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1998.
- Sham, Abu Hassan, *Puisi-puisi Raja Ali Habsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993.
- Wan Daud, Wan Mohd Nor, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung: Mizan, 2003.